

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrea dalam Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Suyatno, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu ? Cetakan Keenam, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Satjpto Rahardjo, Ilmu Hukum Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999) , Mandar Madju, Bandung
- Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Tahun. 2001
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Mardjono Reksodipuro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi
- Indriyanto Seno Adji, KUHAP dalam prospektif, Diadit Media, Jakarta, 2011
- Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012
- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Putusan Pemidanaan, Majalah Varia Keadilan, Tahun Ke XXI No. 246, Mei, 2006, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta

- George Langrod, Administrative Contracts (A Comparative Study), The American Journal of Comparative Law, Vol.IV, Number III, Summer 1995, p.325-326, dalam Yohanes Sogar Simamora, op.cit
- Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung,
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, loc. cit.
- Philipus M. Hadjon, Dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Theodorus M, Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Juniver Girsang, Abuse Of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, JG Publishing, Jakarta, 2012
- Guse Prayudi, Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Varia Peradilan Tahun XXVI No. 29 Oktober 2010
- Frans Liemena, Hukuman Mati atas Delik Korupsi dan HAM, Varia Peradilan Tahun XXVI No.299 Oktober 2010
- Guse Prayudi, 2010, Op. Cit
- Ahmad Dinar, Syaiful. KPK & Korupsi (Dalam Studi Kasus), Cintya Press, Jakarta, 2012
- Djaja, Ermansjah, Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2010
- Sridjaja Pradjonggo, Tjandra KPHA, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010
- Mudjisantosa, Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara, Primaprint, Yogyakarta, 2014

Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Raja Grafindo, Jakarta, 1996

B. Artikel

Perbuatan Melawan Hukum di dalam Hukum Pidana, <http://www.google.co.id>,

Artikel Berita: Sebab-sebab Korupsi, Catatan Akhir Tahun 2008 Masyarakat Transparasi
Indonesia

<http://ubb.ac.id/content/kpk-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barangdan-jasa>

diakses pada 9 Januari 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

